

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS  
Jln. Jend A. Yani No. 25 Telp (0513) 22248-21113 Kode Pos 73513 Kuala Kapuas**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan saran, usulan dan pendapat dari semua pihak guna penyempurnaan penyusunan laporan dimasa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kuala Kapuas,      Maret 2024



**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas**

**ST. MUDIDIN, S.Sos**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680503 198608 1 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas Tahun 2023 memuat capaian kinerja berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dengan rincian pencapaian sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan indikator penurunan kasus pelanggaran perda, dengan capaian 101,43%.
- Sasaran 2 : Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran dengan indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan capaian 140,02%.
- Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar dengan indikator indek kepuasan masyarakat dengan capaian 100,21%.

Secara ringkas tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas dapat diikhtisarkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran berkategori sangat berhasil. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh personil Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Kedudukan .....	1
B. Aspek Strategis Organisasi .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	8
A. Visi dan Misi .....	8
B. Tujuan dan Sasaran .....	8
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	9
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2023.....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	11
A. Pengukuran Kinerja .....	11
B. Analisis Capaian Kinerja .....	12
C. Realisasi Anggaran.....	32
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Pemecahan Masalah .....	40
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Personil Tahun 2023.....	5
Tabel 1.2	Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah ....	6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	9
Tabel 2.2	Rincian Anggaran Tahun 2023 .....	10
Tabel 3.1	Pengelompokkan Nilai dan Predikat Kinerja Tahun 2023.....	11
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja .....	12
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	12
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Unit Kerja/Bidang Dalam Mendukung Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	14
Tabel 3.5	Perbandingan Pencapaian Kinerja Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah .....	15
Tabel 3.6	Perbandingan Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023 .....	15
Tabel 3.7	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Target Akhir Renstra .....	16
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 .....	16
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran .....	21
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Unit Kerja/Bidang Dalam Mendukung Sasaran Penanggulangan Bahaya Kebakaran .....	22
Tabel 3.11	Perbandingan Pencapaian Kinerja Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah .....	22
Tabel 3.12	Perbandingan Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran .....	23

Tabel 3.13	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran Terhadap Target Akhir Renstra .....	23
Tabel 3.14	Data Kejadian Kebakaran Pemukiman Tahun 2023 .....	24
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran .....	25
Tabel 3.16	Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar .....	27
Tabel 3.17	Realisasi Kinerja Unit Kerja/Bidang Dalam Mendukung Sasaran Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar .....	28
Tabel 3.18	Perbandingan Pencapaian Kinerja Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah .....	29
Tabel 3.19	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar Tahun 2019-2023.....	29
Tabel 3.20	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar Terhadap Target Akhir Renstra.....	30
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar .....	30
Tabel 3.22	Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2023.....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi .....	4
Gambar 2	Foto Dokumentasi Giat Satpol PP Tahun 2023.....	18
Gambar 3	Foto Dokumentasi Giat Pemadam Kebakaran Tahun 2023.....	26

## ***BAB I*** **PENDAHULUAN**

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas ini. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah untuk menilai dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan kinerja instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas dalam mencapai tujuan strategis instansi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

### **A** ***Kedudukan***

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meliputi Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

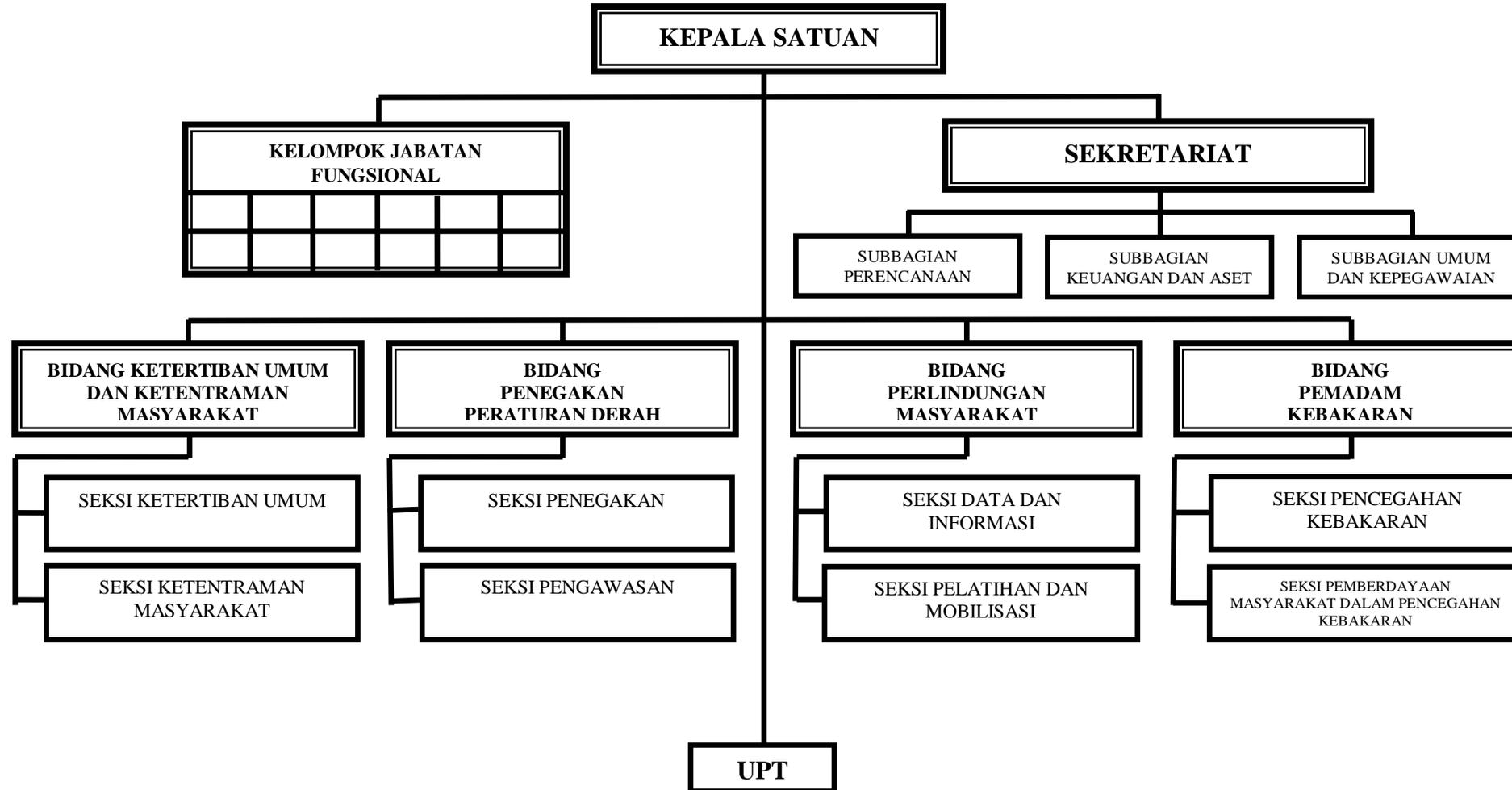
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas maka disusun struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Subagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
  - 1. Seksi Ketertiban Umum; dan
  - 2. Seksi Ketentraman Masyarakat.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
  - 1. Seksi Penegakan;
  - 2. Seksi Pengawasan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - 1. Seksi Data dan Informasi;
  - 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
  - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Berikut bagan Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kapuas :

Gambar 1  
Struktur Organisasi



Jumlah personil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas Tahun 2023 sebanyak 153 orang yang terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data personil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas Tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Personil Tahun 2023**

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Ket
1	Kepala	1	
2	Administrator	5	
3	Pengawas	11	
4	Pelaksana	17	
5	Pol PP Ahli Muda	3	
6	Pol PP Ahli Pertama	4	
7	Pol PP Terampil	5	
8	Pol PP Mahir	8	
9	Tenaga Kontrak	100	
<b>JUMLAH</b>		<b>153 orang</b>	

Sumber : Subbagian umum dan Kepegawaian Satpol PP dan Damkar, 2023

## **B** *Aspek Strategis Organisasi*

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas.

**Tabel 1.2**  
**Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah**

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingginya pelanggaran Perda	Pengawasan Perda tidak berjalan secara optimal
			Penegakan Perda masih rendah
			Kurangnya sosialisasi dan lemahnya koordinasi/hubungan antar Lembaga
		Rendahnya upaya pemeliharaan tibus dan tranmas	Belum optimalnya operasional dan pengendalian keamanan lingkungan
			Belum terpeliharanya ketertiban umum
			Belum terpeliharanya keamanan dan ketentraman masyarakat
		Belum terwujudnya upaya perlindungan masyarakat	Belum lengkapnya data dan informasi Linmas
			Kurangnya pelatihan dan mobilisasi Satlinmas
			Belum diberdayakannya anggota Linmas secara optimal
2.	Belum optimalnya pelayanan dan pencegahan bahaya kebakaran	Masih rendahnya upaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Belum optimalnya pencegahan bahaya kebakaran
			Belum optimalnya inspeksi peralatan proteksi dan investigasi kebakaran
			Kesadaran masyarakat masih rendah dalam upaya pencegahan kebakaran

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penegakan Perda, pemeliharaan trantibum, perlindungan masyarakat (Linmas) dan pemadaman kebakaran.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan tibum dan tranmas, perlindungan masyarakat serta pencegahan bahaya kebakaran.

## ***BAB II***

# **PERENCANAAN KINERJA**

## **A** *Visi dan Misi*

Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan”. Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran serta tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas adalah **Misi ke-13** yaitu Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan.

## **B** *Tujuan dan Sasaran*

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Kapuas maka dirumuskan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju.

Adapun Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2. Meningkatkan penanggulangan bahaya kebakaran
3. Meningkatkan pelayanan Satpol PP dan Damkar

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas adalah :

1. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
2. Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran
3. Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar

## **C** *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*

Sebagai pelaksanaan dari Rencana Strategis tahun 2018-2023, disusun dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja tingkat sasaran strategis dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penurunan kasus pelanggaran Perda	Kasus	70
2.	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	29,41
3.	Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar	Indek Kepuasan Satpol PP dan Damkar	Persen	80

## **D** *Perencanaan Anggaran Tahun 2023*

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp.13.992.142.000,-. Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan, sehingga alokasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.17.970.623.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Rincian Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	174.548.850	188.506.250
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	88.680.000	88.680.000
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	14.381.000	14.381.000
2	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.105.277.000	4.113.153.000
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	4.200.000	1.260.000
			Investigasi Kejadian Kebakaran	3.360.000	3.360.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	866.235.000	991.235.000
3	Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.421.000	93.432.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.681.621.000	8.578.810.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.940.000	2.940.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	529.809.000	383.847.600
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.569.150	531.485.450
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.096.500	61.046.400
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.616.638.000	2.552.100.800
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.415.500	371.797.500
<b>Total Anggaran (Rp).</b>				<b>13.992.142.000</b>	<b>17.970.623.000</b>

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

## **A Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	$\geq 95\%$	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

Hasil pengukuran kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Realisasi Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	101,43%	Sangat berhasil
2.	Meningkatkan penanggulangan bahaya kebakaran	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	140,02%	Sangat berhasil
3.	Meningkatkan pelayanan Satpol PP dan Damkar	Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar	100,21%	Sangat berhasil

## B Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023. Berikut analisis capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas Tahun 2023 :

1. Sasaran pertama **“Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”**.

Dalam sasaran pertama untuk tahun 2023 nilai capaian kinerjanya sebesar 138,82%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja Sasaran pertama **“Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”**:

Tabel 3.3  
Realisasi Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penurunan kasus pelanggaran Perda	kasus	70	69	101,43

Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Penurunan kasus pelanggaran Perda. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah kasus pelanggaran Perda yang selesai ditindak lanjuti. Sedangkan untuk menghitung persentase penurunan digunakan rumus; persentase capaian =  $\frac{\text{target} + (\text{target} - \text{realisasi})}{\text{target}} \times 100$ . Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator Penurunan kasus pelanggaran Perda dapat direalisasi sebesar 69 kasus dari target sebanyak 70 kasus.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa upaya dalam menekan pelanggaran Perda/Perkada. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

- 1) Melaksanakan patroli rutin dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan patroli ini dilaksanakan sebanyak 3 kali sehari dengan sasaran yang berbeda setiap hari antara lain pemantauan pasar, pemantauan kantor atau aset Pemerintah Daerah, pemantauan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah seperti pemasangan spanduk yang tidak pada tempatnya, bangunan baru tanpa izin dan lain-lain.
- 2) Melaksanakan piket dan pengamanan aset Pemerintah Daerah serta kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh Pejabat Daerah. Aset Pemerintah Daerah yang diamankan antara lain Kantor Satpol PP dan Damkar, Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati, dan Kantor Bupati/Sekretariat Daerah. sedangkan kantor lain hanya dilakukan pengawasan dan pengecekan pada saat patroli rutin.
- 3) Melaksanakan patroli Bersama / Razia gabungan dengan aparat TNI/POLRI dengan sasaran hotel, losmen dan penginapan dengan melakukan pengecekan Kartu Identitas terhadap tamu yang datang. Selain itu sasaran lain kegiatan tersebut adalah warung remang-remang dan tempat lain yang diduga rawan tindak kejahatan.
- 4) Melaksanakan sosialisasi tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di beberapa kecamatan.
- 5) melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi di beberapa sekolah terkait pencegahan kenakalan remaja.

- 6) Melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap Pejabat Daerah dan acara yang dihadiri oleh pejabat daerah.
- 7) Melaksanakan penertiban dan penegakan Perda/Perkada.

Dalam mendukung analisis sasaran diatas juga disajikan beberapa indikator kinerja lainnya. Indikator kinerja ini dapat menunjukkan adanya upaya secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja organisasi. Indikator beserta target dan realisasi dibawah ini merupakan capaian dari unit kerja dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Kinerja Bidang/Unit Kerja Dalam Mendukung Sasaran**  
**Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggung Jawab
1.	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Bupati yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	Bidang Penegakan Perda
	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang meningkat kapasitas / kemampuannya	100%	100%	
2.	Persentase penanganan gangguan trantibum yang selesai ditindak lanjuti	100 %	100 %	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.	Persentase kecamatan yang mendapat sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020	100 %	100 %	Bidang Perlindungan Masyarakat
	Persentase sekolah yang dilaksanakan sosialisasi pencegahan kenakalan remaja	0,02 %	0,02 %	
	Persentase konsultasi kegiatan Linmas ke Satpol PP Prov. Kalteng	100 %	100 %	

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Kapasitas personil Anggota Satpol PP masih rendah, hal ini terkait masih banyak Anggota yang belum mengikuti pelatihan teknis kepamongprajaan.
3. Jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) masih kurang.
4. Anggota Satlinmas masih belum diberdayakan secara maksimal.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan Perda/Perkada.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, maka hasilnya tidak diketahui karena untuk mengukur sasaran strategisnya Provinsi tidak menggunakan indikator Penurunan kasus pelanggaran Perda melainkan indikator “persentase meningkatnya penegakan Perda/Pergub di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah”. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Kinerja Provinsi
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penurunan kasus pelanggaran Perda	69	-

Realisasi kinerja Tahun 2023 pada sasaran pertama juga mengalami peningkatan dan penurunan dibandingkan Tahun 2019-2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari Tahun 2019-2023 :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penurunan kasus pelanggaran Perda	121	291	79	52	69

Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada Tahun 2023 mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2023. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra.

**Tabel 3.7**  
**Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Terhadap Target Akhir Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Persentase Kemajuan
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penurunan kasus pelanggaran Perda	70 kasus	69 kasus	101,43%

Capaian kinerja di atas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran pertama **“Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”** adalah sebesar Rp.291.567.250,- dengan realisasi Rp.286.412.170,-. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023**

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	101,43%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	291.567.250	286.412.170	98,23
			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	188.506.250	186.339.770	98,85
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	113.835.000	113.471.100	99,68
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	28.307.000	27.956.920	98,76
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	46.364.250	44.911.750	96,87

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>88.680.000</b>	<b>88.535.000</b>	<b>98,84</b>
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	21.480.000	21.395.000	99,60
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali	67.200.000	67.140.000	99,91
			<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota</b>	<b>14.381.000</b>	<b>11.574.400</b>	<b>80,23</b>
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	14.381.000	11.574.400	80,23
<b>Realisasi Anggaran</b>				<b>291.567.250</b>	<b>286.412.170</b>	<b>98,23</b>
<b>Tingkat Efisiensi</b>						<b>97,25</b>

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama “**Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**”. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Menyusun rencana kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan menganggarkan kegiatan pelatihan/bimtek secara bertahap.
2. Menyusun rencana kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana dan menganggarkannya secara bertahap.
3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pendekatan persuasif agar masyarakat menjadi lebih tahu dan sadar untuk mentaati Perda dan Perkada.
4. Melaksanakan penertiban dan penegakan Perda untuk menjaga kewibawaan pemerintah daerah.

Berikut beberapa foto dokumentasi terkait giat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas selama Tahun 2023 :

**Gambar 2**  
**Dokumentasi Giat Satpol PP Tahun 2023**



Penertiban Badut Peminta Sumbangan



Penertiban Pengemis dan Peminta Sumbangan



Penertiban Kotak Amal Tanpa Izin



Penertiban Baleho, Spanduk, Baner dan Pamflet



Pengawasan Ijin Persetujuan Mendirikan Bangunan Gedung



Penertiban Reklame Rokok



Pengamanan Pos Terpadu





Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja di Beberapa Sekolah



Penataan PKL

2. Sasaran kedua “**Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran**”

Dalam sasaran kedua untuk tahun 2023 nilai capaian kerjanya sebesar 100%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja Sasaran kedua “**Meningkatnya Penanggulan bahaya kebakaran**” :

Tabel 3.9  
Realisasi Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Penanggulan Bahaya Kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	29,41	41,18	140,02

Dalam pencapaian sasaran kedua diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Cakupan pelayanan bencana kebakaran. Indikator ini merupakan hasil perhitungan dari jumlah Luas WMK kabupaten/kota dibagi jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota dikali seratus. Jadi dari Jumlah luas potensi ancaman kebakaran sebesar 14.999 km<sup>2</sup> atau sebanyak 17 kecamatan, dan dari jumlah tersebut sebanyak 7 kecamatan yang menjadi Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Sehingga diperoleh hasil cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 41,18%.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Terlibat aktif dalam upaya pemadaman terhadap musibah kebakaran yang terjadi selama Tahun 2023.
2. Melaksanakan piket dan patroli kesiapsiagaan petugas damkar.
3. Melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran.
4. Melaksanakan inspeksi ke kantor instansi pemerintah.

Dalam mendukung analisis sasaran diatas juga disajikan beberapa indikator kinerja lainnya. Indikator kinerja ini dapat menunjukkan adanya upaya secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja organisasi. Indikator beserta target dan realisasi dibawah ini merupakan capaian dari unit kerja dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan penanggulan bahaya kebakaran.

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Kinerja Bidang/Unit Kerja Dalam Mendukung Sasaran**  
**Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggung Jawab
1.	Persentase cakupan wilayah pelayanan bencana kebakaran	50%	50%	Bidang Pemadam Kebakaran
	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik	40%	40%	
	Persentase Kejadian Kebakaran yang diInvestigasi	50%	50%	
	Persentase relawan pemadam kebakaran yang terlatih dalam penanggulangan kebakaran	30%	30%	

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan sebagai berikut :

1. kurangnya pelatihan pemadaman kebakaran bagi anggota damkar.
2. lemahnya koordinasi antara pemadam pemerintah daerah dengan pemadam swasta.
3. kurangnya sosialisasi dan inspeksi peralatan kebakaran.
4. Masyarakat belum diberdayakannya secara maksimal dalam upaya pencegahan kebakaran.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Kinerja Provinsi
1.	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	41,18%	100%

Realisasi kinerja Tahun 2023 pada sasaran kedua mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2019-2021. Berikut perbandingan capaian kinerja dari Tahun 2019-2023 :

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Pencapaian Sasaran Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran Tahun 2019-2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	29,41	29,41	29,41	29,41	41,18

Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada Tahun 2023 mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2023. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra.

**Tabel 3.13**  
**Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran Terhadap Target Akhir Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Persentase Kemajuan
1.	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	29,41	41,18	140,02

Pada tabel di atas diketahui bahwa perkembangan capaian indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini karena pelayanan bencana kebakaran yang sebelumnya menjangkau 5 (lima) kecamatan, menjadi 7 (tujuh) kecamatan.

Selama Tahun 2023 di Kabupaten Kapuas telah terjadi 29 kali musibah kebakaran pemukiman di 4 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan selat, 24 kasus kebakaran
2. Kecamatan Kapuas Murung, 1 kasus kebakaran
3. Kecamatan Kapuas Barat, 2 kasus kebakaran
4. Kecamatan Kapuas Timur, 2 kasus kebakaran

Berikut data musibah kebakaran pemukiman Tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.14**  
**Data Kejadian Kebakaran Pemukiman Tahun 2023**

No.	Tanggal Kejadian	Lokasi Kejadian	Waktu Tanggap
1.	2 Januari 2023	Kelurahan Palingkau Baru RT 05 Kapuas Murung	20 menit
2.	12 Februari 2023	Pasar Danau Mare RT 15 Kel. Selat Hilir, Selat	5 menit
3.	7 Maret 2023	Jl. Jendral Sudirman (KP-3) Kel. Selat Hilir, Selat	5 menit
4.	9 April 2023	PT Kayu Lima Sejahtera Desa Anjir Serapat Timur, Kapuas Timur	15 menit
5.	15 April 2023	Jl. Sumatera Gg. I RT 17 Kel. Selat Hilir, Selat	8 menit
6.	28 April 2023	Jl. Keruing Gg. IV RT 3 Kel. Selat Dalam, Selat	8 menit
7.	8 Mei 2023	Perumnas Pulau Telo Jl. Nuri RT 05 RW 05 Kel. Selat Barat, Selat	8 menit
8.	6 Juni 2023	Jl. Tambun Bungai Gg. V Kel. Selat Dalam, Selat	7 menit
9.	11 Juni 2023	Jl. Kapuas RT 1 RW 1 Kel. Selat Hulu, Selat	8 menit
10.	22 Juni 2023	Jl. Pemuda Gg.II RT 15 Kel. Selat Dalam, Selat	7 menit
11.	27 Juni 2023	Jl. Pemuda RT 8 RW 2 Kel. Selat Dalam, Selat	7 menit
12.	13 Juli 2023	Jl. Cilik Riwut Gg. II Kel. Selat Dalam, Selat	6 menit
13.	28 Juli 2023	Jl. Cilik Riwut RT 9 RW 3 Pasar Sabtu Kel. Selat Hulu, Selat	6 menit
14.	3 Agustus 2023	Jl. Tendean RT 20 (ex Gedung AKPER) Kel. Selat Hilir, Selat	5 menit
15.	6 Agustus 2023	Jl. Jepang Desa Pulau Telo Baru, Selat	7 menit
16.	17 Agustus 2023	PT. Karya Sejati Kel. Murung Keramat, Selat	17 menit
17.	29 Agustus 2023	Jl. Jepang Kel. Selat Utara, Selat	7 menit
18.	1 September 2023	Jl. Garuda RT 4 RW 2 Kel. Selat Barat, Selat	7 menit
19.	3 September 2023	Jl. A. Yani Gg. VII Rt 19 Kel. SelatHilir, Selat	5 menit
20.	5 September 2023	Jl. Trans KalimantanGg Karya 45 RT 3 Desa Anjir Serapat Barat, Kapuas Timur	8 menit
21.	9 September 2023	Jl. K.S. Tubun RT 3 Kel. Selat Hilir, Selat	5 menit
22.	27 September 2023	Jl. Untung Suropati RT 10 dan RT 18 Kel. Selat Hilir, Selat	5 menit
23.	5 Oktober 2023	Jl. Pemuda RT 10 Perumahan Grand Citra Mas Kel. Selat Dalam, Selat	7 menit
24.	10 Oktober 2023	Jl. Sudirman RT 1 RW 1 Kel. Selat Hilir, Selat	5 menit
25.	18 Oktober 2023	Jl. Anggrek Gg. Family RT 9 RW 2 Kel. Selat Hilir, Selat	5 menit
26.	14 November 2023	Jl. Anggrek Gg. Family Pasar Sari Mulia Kel. Selat Hilir, Selat	5 menit
27.	15 November 2023	Jl. Ria Gilang dan Jl. Rusan RT 10 Kel. Mandomai, Kapuas Barat	25 menit
28.	22 November 2023	Jl. Cilik Riwut Gg. IIIa RT 12 Kel. Selat Dalam, Selat	6 menit
29.	30 November 2023	Desa Sei Pitung RT 13, Kapuas Barat	10 menit

Capaian kinerja di atas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran kedua “Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran” adalah sebesar Rp.5.109.008.000,- dengan realisasi Rp.5.029.470.140,-. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran kedua :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran Tahun 2023**

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	140,02%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.109.008.000	5.029.470.140	98,44
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.113.153.000	4.034.480.140	98,09
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.300.000	15.159.000	99,08
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	89.151.000	80.890.000	90,73
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	3.360.000	3.360.000	100,00
			Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4.005.342.000	3.935.071.140	98,25
			<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>100,00</b>
			Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	1.260.000	1.260.000	100,00
			<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>91,67</b>
			Investigasi Kejadian Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	3.360.000	3.080.000	91,67
			<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>991.235.000</b>	<b>990.650.000</b>	<b>99,94</b>
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	991.235.000	990.650.000	99,94
			<b>Realisasi Anggaran</b>			
<b>Tingkat Efisiensi</b>						<b>97,46</b>

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran kedua “Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran”. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Meningkatkan kerjasama dengan Barisan Pemadam Kebakaran (atau sebutan lainnya).
2. Menyusun mitigasi atau pemetaan wilayah rawan kebakaran.
3. Merevisi dan Menyusun SOP pemadaman kebakaran.

4. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan pemadaman kebakaran.
5. Melakukan inspeksi peralatan damkar ke kantor pemerintah dan fasilitas publik dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran.
6. Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran secara bertahap.
7. Menganggarkan kegiatan pelatihan/bimtek secara bertahap.

Berikut beberapa foto dokumentasi terkait giat pemadam kebakaran yang dilaksanakan selama Tahun 2023 :

**Gambar 3**  
**Dokumentasi Giat Damkar Tahun 2023**





Pemadaman Kebakaran



Sosialisasi Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dalam Pencegahan Kebakaran di Kec. Kapuas Tengah dan Kapuas Hulu



Penilaian Sarpras Proteksi Kebakaran di Beberapa Puskesmas

### 3. Sasaran ketiga “Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar”

Dalam sasaran ketiga untuk tahun 2023 nilai capaian kinerjanya sebesar 100,69%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja Sasaran ketiga “Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar”

Tabel 3.16  
Realisasi Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar	Indek Kepuasan Masyarakat	Persen	80	80,17	100,21

Dalam pencapaian sasaran ketiga diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Indikator ini diperoleh dari perhitungan hasil survei dengan formulasi perhitungan Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang diisi dikali nilai penimbang. Berdasarkan tabel diatas, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat direalisasi sebesar 80,17% dari target sebesar 80%.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Perbaiki tempat pengaduan.
2. Menyusun SOP pelayanan.
3. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala.

Dalam mendukung analisis sasaran diatas juga disajikan beberapa indikator kinerja lainnya. Indikator kinerja ini dapat menunjukkan adanya upaya secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja organisasi. Indikator beserta target dan realisasi dibawah ini merupakan capaian dari unit kerja dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar.

**Tabel 3.17**  
**Realisasi Kinerja Bidang/Unit Kerja Dalam Mendukung Sasaran**  
**Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggung Jawab
1.	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	Sekretariat
2.	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	100%	
3.	Persentase pengadministrasian barang milik daerah secara baik dan benar	100%	100%	
4.	Persentase pengadministrasian kepegawaian Perangkat Daerah secara tertib dan teratur	100%	100%	
5.	Persentase pengadministrasian umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	
6.	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Penanggung Jawab
7.	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	100%	
8.	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan sebagai berikut :

1. rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur, dan
2. kurangnya informasi layanan Satpol PP dan Damkar.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, maka hasilnya tidak diperoleh karena Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 yang lalu tidak melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 3.18**  
Perbandingan Pencapaian Kinerja Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Kinerja Provinsi
1.	Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar	Indek Kepuasan Masyarakat	80,17	-

Realisasi kinerja Tahun 2023 pada sasaran ketiga juga mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019-2022. Berikut perbandingan capaian kinerja dari Tahun 2019-2023 :

**Tabel 3.19**  
Perkembangan Kinerja Sasaran  
Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar Tahun 2019-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar	Indek Kepuasan Masyarakat	79,61	79,70	80,03	80,05	80,17

Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada Tahun 2023 mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun

2023. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra.

**Tabel 3.20**  
Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar Terhadap Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Persentase Kemajuan
1.	Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar	Indek Kepuasan Masyarakat	80	80,17	100,21

Capaian kinerja di atas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran kedua “Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar” adalah sebesar Rp.12.570.047.750,- dengan realisasi Rp.8.828.026.370,-. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran ketiga :

**Tabel 3.21**  
Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar Tahun 2023

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar	100,21%	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.570.047.750</b>	<b>8.828.026.370</b>	<b>70,23</b>
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>93.432.000</b>	<b>88.174.608</b>	<b>94,37</b>
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.602.000	67.722.408	95,92
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.800.000	2.800.000	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.240.000	2.100.000	93,75
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.260.000	1.260.000	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.260.000	1.260.000	100,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.910.000	9.672.200	81,21
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.360.000	3.360.000	100,00
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.578.810.000</b>	<b>4.898.847.349</b>	<b>57,10</b>
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	8.490.281.000	4.816.219.571	56,73
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	78.589.000	75.767.778	96,41
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.100.000	1.680.000	80,00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.480.000	2.100.000	46,88

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	3.360.000	3.080.000	91,67
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.940.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>57,14</b>
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.260.000	0	-
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.680.000	1.680.000	100,00
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>383.847.600</b>	<b>381.944.100</b>	<b>99,50</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.450.000	9.450.000	100,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.360.000	3.080.000	91,67
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	233.791.600	233.261.000	99,77
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	137.246.000	136.153.100	99,20
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>531.485.450</b>	<b>522.230.523</b>	<b>98,26</b>
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	29.522.000	29.052.252	98,41
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.430.000	2.285.000	94,03
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.210.000	8.210.000	100,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210.379.650	201.762.600	95,90
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.993.500	10.993.500	100,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.950.300	269.927.171	99,99
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>61.046.400</b>	<b>57.470.000</b>	<b>94,14</b>
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.046.400	57.740.000	94,14
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.552.100.800</b>	<b>2.531.377.290</b>	<b>99,19</b>
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	161.038.000	148.398.519	92,15
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.391.062.800	2.382.978.771	99,66
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>366.385.500</b>	<b>346.302.500</b>	<b>94,52</b>
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	79.600.100	75.232.100	94,51
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.615.400	179.416.800	93,63
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000	85.000.000	100,00

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.170.000	6.653.600	65,42
<b>Realisasi Anggaran</b>				<b>12.570.047.750</b>	<b>8.828.026.370</b>	<b>70,23</b>
<b>Tingkat Efisiensi</b>						<b>69,53</b>

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran ketiga **“Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar”**. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja :

1. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala,
2. melakukan perbaikan pada ruang pelayanan,
3. menyediakan tempat pengaduan,
4. melakukan revisi standar pelayanan, dan
5. meningkatkan informasi pelayanan dengan menggunakan media sosial.

## C Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas untuk Tahun Anggaran 2023 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.22  
Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
A.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100	291.567.250	286.412.170	98,23
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penanganan gangguan trantibum yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100	188.506.250	186.339.770	98,85
a.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	365 kasus	365 kasus	100	113.835.000	113.471.100	99,68

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						
b.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	28.307.000	27.956.920	98,76
c.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	100	46.364.250	44.911.750	96,87
<b>2.</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Bupati yang selesai ditindak lanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>88.680.000</b>	<b>88.535.000</b>	<b>98,84</b>
a.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	100	21.480.000	21.395.000	99,60
b.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	100	67.200.000	67.140.000	99,91
<b>3.</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang meningkat kapasitas / kemampuannya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>14.381.000</b>	<b>11.574.400</b>	<b>80,23</b>
a.	Pengembangan Kapsitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	2 Laporan	100	14.381.000	11.574.400	80,23
<b>A.</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Tingkat waktu tanggap (response time rate)</b>	<b>81,25%</b>	<b>89,66%</b>	<b>110,35</b>	<b>5.109.008.000</b>	<b>5.029.470.140</b>	<b>98,44</b>

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase cakupan wilayah pelayanan bencana kebakaran</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100</b>	<b>4.113.153.000</b>	<b>4.034.480.140</b>	<b>98,09</b>
a.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	100	15.300.000	15.159.000	99,08
b.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	12 Laporan	12 Laporan	100	89.151.000	80.890.000	90,73
c.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3.360.000	3.360.000	100,00
d.	Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 unit	6 unit	100	4.005.342.000	3.935.071.140	98,25
2.	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Persentase peralatan proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>100</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>100,00</b>
a.	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan / Gedung / Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1.260.000	1.260.000	100,00
3.	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>Persentase Kejadian Kebakaran yang diInvestigasi</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.080.000</b>	<b>91,67</b>
a.	Investigasi Kejadian Kebakaran Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan	12 dokumen	11 dokumen	91,67	3.360.000	3.080.000	91,67

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Penelitian						
4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan pemadam kebakaran yang terlatih dalam penanggulangan kebakaran	30%	30%	100	991.235.000	990.650.000	99,94
a.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa / kelurahan	1 Desa / kelurahan	100	991.235.000	990.650.000	99,94
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan	100%	90%	90	12.570.047.750	8.828.026.370	70,23
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100	93.432.000	88.174.608	94,37
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	70.602.000	67.722.408	95,92
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	2.800.000	2.800.000	100,00
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	2.240.000	2.100.000	93,75
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1.260.000	1.260.000	100,00
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1.260.000	1.260.000	100,00
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	15 laporan	15 laporan	100	11.910.000	9.672.200	81,21

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
g.	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	100	3.360.000	3.360.000	100,00
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>8.578.810.000</b>	<b>4.898.847.349</b>	<b>57,10</b>
a.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang / bulan	53 orang / bulan	100	8.490.281.000	4.816.219.571	56,73
b.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	78.589.000	75.767.778	96,41
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100	2.100.000	1.680.000	80,00
d.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	100	4.480.000	2.100.000	46,88
e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	100	3.360.000	3.080.000	91,67
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengadministrasian barang milik daerah secara baik dan benar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>2.940.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>57,14</b>
a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1.260.000	0	-
b.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	100	1.680.000	1.680.000	100,00
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengadministrasian kepegawaian Perangkat Daerah secara tertib dan teratur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>383.847.600</b>	<b>381.944.100</b>	<b>99,50</b>
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100	9.450.000	9.450.000	100,00
b.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	8 Dokumen	8 Dokumen	100	3.360.000	3.080.000	91,67

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						
c.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	100	233.791.600	233.261.000	99,77
d.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	100	137.246.000	136.153.100	99,20
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pengadministrasian umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>531.485.450</b>	<b>522.230.523</b>	<b>98,26</b>
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	29.522.000	29.052.252	98,41
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	2.430.000	2.285.000	94,03
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	8.210.000	8.210.000	100,00
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	210.379.650	201.762.600	95,90
e.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100	10.993.500	10.993.500	100,00
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100	269.950.300	269.927.171	99,99
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>61.046.400</b>	<b>57.470.000</b>	<b>94,14</b>
a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100	61.046.400	57.740.000	94,14
<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>2.552.100.800</b>	<b>2.531.377.290</b>	<b>99,19</b>
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	161.038.000	148.398.519	92,15

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100	2.391.062.800	2.382.978.771	99,66
<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>366.385.500</b>	<b>346.302.500</b>	<b>94,52</b>
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100	79.600.100	75.232.100	94,51
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	100	191.615.400	179.416.800	93,63
c.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	85.000.000	85.000.000	100,00
d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	100	10.170.000	6.653.600	65,42

## ***BAB IV***

# **PENUTUP**

## **A** ***Kesimpulan***

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas untuk Tahun 2023 yaitu :

- ❖ Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan indikator penurunan kasus pelanggaran perda, dengan capaian 101,43%.
- ❖ Sasaran 2 : Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran dengan indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan capaian 140,02%.
- ❖ Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar dengan indikator indek kepuasan masyarakat dengan capaian 100,21%.

Terlepas dari keberhasilan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas memiliki kelemahan/kekurangan dan kendala. Berikut hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan sasaran :

- ❖ Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan kendala Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Perda dan Perkada karena kurangnya penyuluhan, kurangnya Pejabat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), lemahnya koordinasi antar aparat, dan kurangnya pelatihan kepomong prajaan bagi Anggota Satpol PP.
- ❖ Sasaran 2 : Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran, dengan kendala kurangnya pelatihan pemadaman kebakaran bagi anggota damkar, belum disusunnya mitigasi atau pemetaan wilayah rawan kebakaran, lemahnya koordinasi antara pemadam pemerintah daerah dengan pemadam swasta, serta kurangnya sosialisasi dan inspeksi peralatan kebakaran.

- ❖ Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar, dengan kendala rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur, dan kurangnya informasi layanan Satpol PP dan Damkar.

## **B** *Pemecahan Masalah*

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas :

- ❖ Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan cara Menyusun rencana kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan menganggarkan kegiatan pelatihan/bimtek secara bertahap, Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pendekatan persuasif agar masyarakat menjadi lebih tahu dan sadar untuk mentaati Perda dan Perkada,
- ❖ Sasaran 2 : Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran, dengan cara Menyusun mitigasi atau pemetaan wilayah rawan kebakaran, merevisi SOP pemadaman kebakaran, meningkatkan kerjasama dengan pemadam swasta, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pemadaman kebakaran, melakukan inspeksi peralatan damkar ke kantor pemerintah dan fasilitas publik dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran, serta menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan kegiatan pelatihan/bimtek secara bertahap.
- ❖ Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar, dengan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala, melakukan perbaikan pada ruang pelayanan, menyediakan tempat pengaduan, melakukan revisi standar pelayanan, dan meningkatkan informasi pelayanan dengan menggunakan media sosial.

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

- A. PERJANJIAN KENERJA TAHUN 2023
  - 1. Perjanjian Kinerja Kepala Satpol PP dan Damkar Tahun 2023
  - 2. Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III)
  - 3. Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
  
- B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
  
- C. RENCANA AKSI SATPOL PP DAN DAMKAR TAHUN 2023



**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAHRIPIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT**

Jabatan : **BUPATI KAPUAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,  
**BUPATI KAPUAS,**

**Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT**

Pihak Pertama,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS,**

**SYAHRIPIN, S.Sos**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19680503 198608 1 001

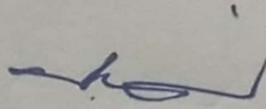
**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	70 kasus
2.	Meningkatnya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	29,41%
3.	Meningkatnya Pelayanan Satpol PP dan Damkar	Indek Kepuasan Satpol PP dan Damkar	80%

Program		Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8.735.510.150
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 277.609.850
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp. 4.979.022.000

Kuala Kapuas, Januari 2023

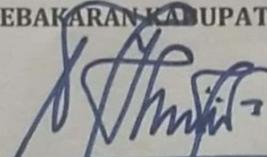
Pihak Kedua  
BUPATI KAPUAS,



Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM, MT

Pihak Pertama

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS,



SYAHRI PIN, S.Sos  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19680503 198608 1 001



**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TEGUH YUNianto, SP**

Jabatan : **SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAHRIPIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN  
KAPUAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS,**

**SYAHRIPIN, S.Sos**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19680503 198608 1 001

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS,**

**TEGUH YUNianto, SP**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19720623 199903 1 007

**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%
3.	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian barang milik daerah secara baik dan benar	100%
4.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian kepegawaian Perangkat Daerah secara tertib dan teratur	100%
5.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%
6.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%
7.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%
8.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%

Program-Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 57.421.000
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.681.621.000
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 2.940.000
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 529.809.000
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 450.569.150
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 29.096.500
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.616.638.000
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 367.415.500

Kuala Kapuas, Januari 2023

**Pihak Kedua**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,

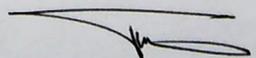
  
**SYAHRIPIN, S.Sos**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680503 198608 1 001

**Pihak Pertama**

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,

  
**TEGUH YUNIANTO, SP**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19720623 199903 1 007



**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RICKY ADI SAPUTRA, S.STP, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAHRIPIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN  
KAPUAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

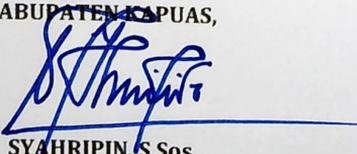
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,

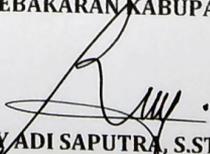
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS,**

  
**SYAHRIPIN, S.Sos**

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680503 198608 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN  
DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS,**

  
**RICKY ADI SAPUTRA, S.STP, MM**

Pembina (IV/a)  
NIP. 19800813 199810 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Bupati yang selesai ditindak lanjuti	100%
2.	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang meningkat kapasitas / kemampuannya	100%

Program-Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 88.860.000
2. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp. 14.381.000

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua

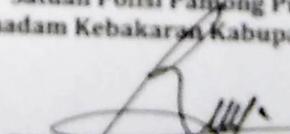
Pihak Pertama

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,

Kabid. Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,



**SYAHRIPIN, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680503 198608 1 001



**RICKY ADI SAPUTRA, S.STP, MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19800813 199810 1 001



**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ELNADA, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAHRIPIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN  
KAPUAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS,**

**SYAHRIPIN, S.Sos**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19680503 198608 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS,**

**ELNADA, S.Sos**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680804 199012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

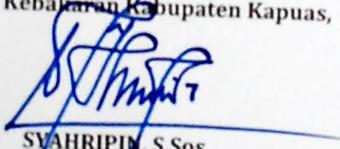
NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penanganan gangguan trantibum yang selesai ditindak lanjuti	100%

Program-Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 99.856.000

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,



**SYAHRUDIN, S.Sos**  
Pmbina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680503 198608 1 001

Pihak Pertama

Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,



**ELNADA, S.Sos**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680804 199012 1 001



**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NAZMIANNOOR, S.Pd, MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAHRIPIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

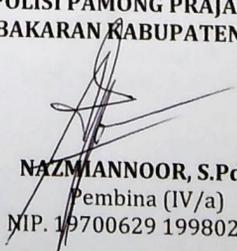
Pihak Kedua,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS,**

  
**SYAHRIPIN, S.Sos**  
Pembina Tk.1 (IV/b)  
NIP. 19680503 198608 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS,**

  
**NAZMIANNOOR, S.Pd, MT**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700629 199802 1 002

**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

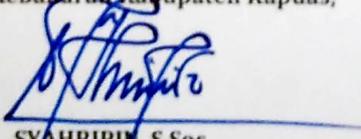
NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya pemberdayaan perlindungan masyarakat	Persentase kecamatan yang mendapat sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020	100 %
		Persentase sekolah yang dilaksanakan sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja	0,02 %
		Persentase konsultasi kegiatan perlindungan masyarakat ke Satpol PP Prov. Kalteng	100 %

Program-Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 74.692.850

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua

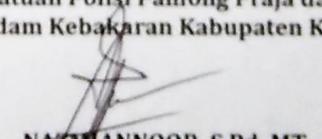
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,



**SYAHRUDIN, S.Sos**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19680503 198608 1 001

Pihak Pertama

Kabid. Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,



**NAZMIANNOORA, S.Pd, MT**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700629 199802 1 002



**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JENDERAWAN, ST**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAHRIPIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS,**

**SYAHRIPIN, S.Sos**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680503 198608 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS,**

**JENDERAWAN, ST**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19710616 200312 1 003

**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

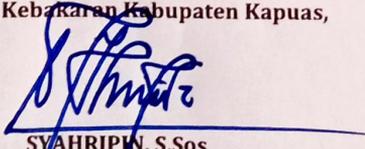
NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase cakupan wilayah pelayanan bencana kebakaran	50%
2.	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik	40%
3.	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang diInvestigasi	50%
4.	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan pemadam kebakaran yang terlatih dalam penanggulangan kebakaran	30%

Program-Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.105.227.000
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp. 4.200.000
3. Investigasi Kejadian Kebakaran	Rp. 3.360.000
4. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 866.235.000

Kuala Kapuas, Januari 2023

**Pihak Kedua**

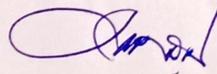
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,



**SYAHRUDIN, S.Sos**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19680503 198608 1 001

**Pihak Pertama**

Kabid. Pemadam Kebakaran  
Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,



**JENDERAWAN, ST**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19710616 200312 1 003



**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN**  
**SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAHDIAR ROZALIE, S.Sos**  
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TEGUH YUNianto, SP**  
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**Sekretaris,**

**TEGUH YUNianto, SP**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19720623 199003 1 007

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Pertama,  
**Kepala Sub Bagian Perencanaan,**

**FAHDIAR ROZALIE, S.Sos**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19770404 200701 1 015

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN**  
**SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

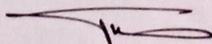
No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan
7.	Terlaksananya Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan

Kegiatan-Sub Kegiatan	Anggaran
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 37.821.000
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.800.000
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 2.800.000
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp. 2.800.000
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp. 2.800.000
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 5.040.000
7. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.360.000

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,

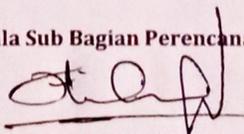
Sekretaris,



**TEGUH YUNIANTO, SP**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19720623 199003 1 007

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Perencanaan,



**FAHDIAR ROZALIE, S.Sos**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19770404 200701 1 015



**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**  
**SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDURRAHMAN HARIS, SE, MA**  
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TEGUH YUNianto, SP**  
Jabatan : **SEKRETARIS**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris,

**TEGUH YUNianto, SP**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19720623 199003 1 007

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset,

**ABDURRAHMAN HARIS, SE, MA**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19831014 200312 1 003

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/bulan
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 dokumen
3.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
4.	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen
5.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan
6.	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen
7.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan

Kegiatan-Sub Kegiatan	Anggaran
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 4.636.800.000
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 34.881.000
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 2.100.000
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 4.480.000
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 3.360.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 1.260.000
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 1.680.000

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,

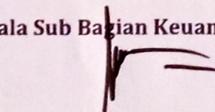
Sekretaris,



**TEGUH YUNianto, SP**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19720623 199003 1 007

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset,



**ABDURRAHMAN HARIS, SE, MA**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19831014 200312 1 003



**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD SAFI' I ISKANDAR, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TEGUH YUNianto, SP**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,**

Pihak Kedua,

**Sekretaris,**

**TEGUH YUNianto, SP**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19720623 199003 1 007

**AHMAD SAFI' I ISKANDAR, SE**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19680417 200003 1 007

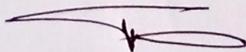
**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**  
**SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen
3.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang
4.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang
5.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
6.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
7.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
8.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
9.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
10.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
11.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit
12.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
13.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
14.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
15.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit
16.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit
17.	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
18.	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	15 Unit

Kegiatan-Sub Kegiatan	Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 10.000.000
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 3.360.000
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 387.981.000
4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 128.468.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp. 29.522.000
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 2.430.000
3. Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 8.210.000
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 223.219.650
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 10.993.500
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 176.194.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 29.096.500
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 2.200.000
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 153.578.000
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.460.860.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 74.630.100
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas atau operasional	Rp. 197.615.400
3. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 85.000.000
4. Pemeliharaan /rehabilitasi sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 10.170.000

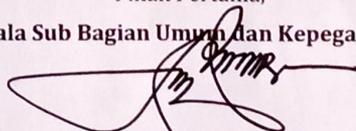
Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Sekretaris,



**TEGUH YUNianto, SP**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19720623 199003 1 007

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



**AHMAD SAFFI ISKANDAR, SE**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19680417 200003 1 007



**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PENEGAKAN  
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TEDDY PURWANTO, SH**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PENEGAKAN PADA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KAPUAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RICKY ADI SAPUTRA, S.STP, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN KAPUAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Pertama,

**Kepala Seksi Penegakan,**

**TEDDY PURWANTO, SH**

Penata (III/c)

NIP. 19751220 200604 1 014

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,**

**RICKY ADI SAPUTRA, S.STP, MM**

Pembina (W/a)

NIP. 19800813 199810 1 001

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SEKSI PENEGAKAN**  
**BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	70 Laporan

Kegiatan-Sub Kegiatan	Anggaran
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 67.200.000

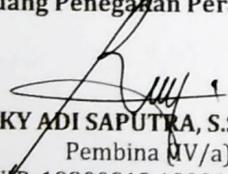
Kuala Kapuas, Januari 2023

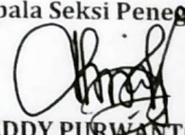
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,**

**Kepala Seksi Penegakan,**

  
**RICKY ADI SAPUTRA, S.STP, MM**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19800813 199810 1 001

  
**TEDDY PURWANTO, SH**  
 Penata (III/c)  
 NIP. 19751220 200604 1 014



**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PENGAWASAN  
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI SUPRAPTO, SE**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGAWASAN PADA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KAPUAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RICKY ADI SAPUTRA, S.STP, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PADA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN KAPUAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Pertama,

**Kepala Seksi Pengawasan,**

**DWI SUPRAPTO, SE**

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19650306 199103 1 011

Pihak Kedua,

**Kabid. Penegakan Peraturan Daerah,**

**RICKY ADI SAPUTRA, S.STP, MM**

Pembina (I/II/a)

NIP. 19800813 199810 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SEKSI PENGAWASAN  
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

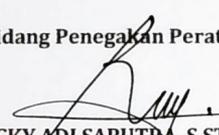
No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan
2.	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan

Kegiatan-Sub Kegiatan	Anggaran
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 21.480.000
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp. 14.381.000

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah,**

  
**RICKY ADI SAPUTRA, S.STP, MM**  
Pembina (M/a)  
NIP. 19800813 199810 1 001

Pihak Pertama,

**Kepala Seksi Pengawasan,**

  
**DWI SUPRAPTO, SE**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19650306 199103 1 011



**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM**  
**BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUBERDI, S.I.P**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM PADA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KAPUAS**  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ELNADA, S.Sos**  
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KAPUAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Ketertiban Umum dan  
Ketentraman Masyarakat,**



**ELNADA, S.Sos**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19680804 199012 1 001

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Pertama,

**Kepala Seksi Ketertiban Umum,**



**SUBERDI, S.I.P**  
Penata (III/c)  
NIP. 19800521 200801 1 018

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM**  
**BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 kasus

Kegiatan-Sub Kegiatan	Anggaran
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 99.856.000

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,**

**Kepala Seksi Ketertiban Umum,**




**ELNADA, S.Sos**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19680804 199012 1 001

**SUBERDI, S.I.P**  
Penata (III/c)  
NIP. 19800521 200801 1 018



**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SEKSI KETENTRAMAN MASYARAKAT**  
**BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS PRANOTO, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SEKSI KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN KAPUAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ELNADA, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA SATPOL  
PP DAN DAMKAR KABUPATEN KAPUAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Pertama,

**Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat,**

**AGUS PRANOTO, S.Sos**

Penata (III/c)

NIP. 19760812 200604 1 014

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Ketertiban Umum dan  
Ketentraman Masyarakat,**

**ELNADA, S.Sos**

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19680804 199012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SEKSI KETENTERAMAN MASYARAKAT**  
**BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 kasus

Kegiatan-Sub Kegiatan	Anggaran
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 99.856.000

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,**



**ELNADA, S.Sos**  
 Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19680804 199012 1 001

Pihak Pertama,

**Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat,**



**AGUS PRANOTO, S.Sos**  
 Penata (III/c)  
 NIP. 19760812 200604 1 014



**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RONY DWIANTO,SE**

Jabatan : **KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NAZMIANNOOR,S.Pd.MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

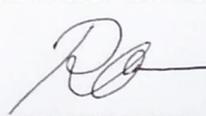
Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS,**

  
**NAZMIANNOOR, S.Pd, MT**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700629 199802 1 002

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS,**

  
**RONY DWIANTO,SE**  
Penata TK I (III/d)  
NIP. 19770121 200901 1 004

**PERJANJIAN KINERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen Yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kecamatan Yang Mendapat Sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Dan Sim Linmas	100 %

Program-Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Pemeberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban	Rp. 51.409.850

Kuala Kapuas, Januari 2023

**Pihak Kedua**

Kapala Bidang Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,

  
**NAZMIANNOOR, S.Pd, MT**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700629 199802 1 002

**Pihak Pertama**

**KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI BIDANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN KAPUAS,**

  
**RONY DWIANTO, SE**  
Penata TK I (III/d)  
NIP. 19770121 200901 1 004



**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN MOBILISASI**  
**BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDY WAHYUDI, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN MOBILISASI PADA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KAPUAS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NAZMIANNOOR, S.Pd, MT**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KAPUAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

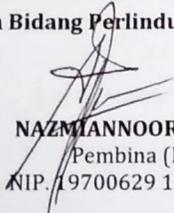
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari 2023

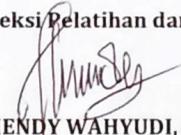
Pihak Kedua,

**Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat,**

  
**NAZMIANNOOR, S.Pd, MT**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700629 199802 1 002

Pihak Pertama,

**Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi,**

  
**HENDY WAHYUDI, S.Sos**  
Penata Muda Tk.I (III/b)  
NIP. 19760103 200604 1 012

**PERJANJIAN KINERJA**  
**KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN MOBILISASI**  
**BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

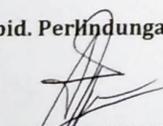
No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen Yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Sekolah Yang Dilaksanakan sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja 643 Sekolah di wilayah Kabupaten Kapuas	12 Kali
2	Tersedianya Dokumen Yang Memuat Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah konsultasi Sat Linmas Kabupaten Kapuas Ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	1 kali

Kegiatan-Sub Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman Dan Ketertiban	Rp. 18.480.000
2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 4.803.000

Kuala Kapuas, Januari 2023

Pihak Kedua,

**Kabid. Perlindungan Masyarakat,**

  
**NAZMIANNOOR, S.Pd, MT**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19700629 199802 1 002

Pihak Pertama,

**Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi,**

  
**HENDY WAHYUDI, S.Sos**  
 Penata Muda Tk.I (III/b)  
 NIP. 19760103 200604 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**Jln. Jenderal A. Yani No. 25 Telp. (0513) 22248-21113 Kode Pos 73513**  
**KUALA KAPUAS**

---

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 027/ 103-A/POL PP-PK/2023

**T E N T A N G**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas Tahun 2023.
- Mengingat
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 33);
  - 5. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas.
- KETIGA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 04 Januari 2023



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,

**SYAHRIPIN, S.Sos**  
Pembina Tk I [IV/b]  
NIP. 19680503 198608 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas  
Up. Kepala Bagian Organisasi Setda Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kpuas

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penurunan kasus pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran Perda yang selesai ditindak lanjuti	Bidang Penegakan Perda	Laporan Bidang Penegakan Perda
2	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	$\frac{\text{jumlah Luas WMK kabupaten/kota}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota}} \times 100\%$	Bidang Damkar	Laporan Bidang Damkar
3	Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar	Indek Kepuasan Satpol PP dan Damkar	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Sekretariat	Laporan Hasil Survei

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,



SYAHRIPIA, S.Sos  
Pembina Tk.I [IV/b]  
NIP. 19680503 198608 1 001

**RENCANA AKSI KINERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KAPUAS**  
**TAHUN 2023**

Kepala Satpol PP dan Damkar										
No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Program	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penurunan kasus pelanggaran Perda	70 kasus	15	35	55	70	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, Pembinaan PPNS	277,609,850
2	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	29.41%	29.41%	29.41%	29.41%	29.41%	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, inspeksi dan investigasi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	4,979,022,000
3	Meningkatnya pelayanan Satpol PP dan Damkar	Indek Kepuasan Satpol PP dan Damkar	80.00%	-	-	-	80.00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Admistrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi barang, pengadaan barang dan pemeliharaan barang milik daerah	8,735,510,150

Sekretaris										
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57,421,000
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan akuntansi, penyusunan laporan bulanan, semesteran dan akhir tahun, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	4,681,621,000
3	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian barang milik daerah secara baik dan benar	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rekonsiliasi	2,940,000
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian kepegawaian Perangkat Daerah secara tertib dan teratur	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas, koordinasi kepegawaian dan pelaksanaan bimtek dan sosialisasi	529,809,000
5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman harian dan rapat, penyediaan bahan bacaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	450,569,150

6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarpras gedung kantor dan sarpras gedung kantor lainnya	29,096,500
7	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum	2,616,638,000
8	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional, pemeliharaan /rehab gedung kantor, pemeliharaan sarpras gedung kantor	367,415,500

**Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penanganan gangguan trantibum yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Pencegahan gangguan trantibum	99,856,000

**Kepala Bidang Penegakan Perda**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Bupati yang selesai ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan dan penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	88,680,000
2	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang meningkat kapasitas /	100%	100%	100%	100%	100%	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas PPNS	14,381,000

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat										
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya pemberdayaan perlindungan masyarakat	Jumlah pemberdayaan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan	2 macam	1 macam	1 macam	-	-	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	koordinasi penyelenggaraan trantibum dan linmas,serta pemberdayaan linmas	74,692,850
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran										
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	3 macam	3 macam	3 macam	3 macam	3 macam	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan kebakaran	4,105,227,000
2	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	2 kali	-	1 kali	1 kali	-	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	4,200,000
3	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran	2 kali	-	1 kali	1 kali	-	Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	3,360,000
4	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	1 kali	-	-	1 kali	-	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Sosialisasi damkar	866,235,000
Kepala Sub Bagian Perencanaan										
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Sub Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	-	2 dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen RPD, RENSTRA, Renja, dan Renja perubahan	37,821,000

2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,800,000
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,800,000
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,800,000
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2,800,000
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	6 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan laporan LKIP, LPPD, SPM dan laporan bulanan TEPR	5,040,000
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perjalanan dinas dalam rangka Pelaksanaan Survei kepuasan masyarakat	3,360,000

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset										
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Sub Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Disediakan Gaji Dan Tunjangannya	53 orang	53 orang	53 orang	51 orang	51 orang	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4,636,800,000
2	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 laporan	1 laporan	1 laporan	-	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Bimtek Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34,881,000
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2,100,000
4	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 kali	1 kali	-	1 kali	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Perjalanan dinas dalam rangka Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4,480,000
5	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	3,360,000
6	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,260,000
7	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1 laporan	1 laporan	-	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Perjalanan dinas dalam rangka rekonsiliasi aset	1,680,000

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Sub Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	-	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian Korpri	10,000,000
2	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi kepegawaian	3,360,000
3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	-	12 orang	-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat PIM II, III dan IV	387,981,000
4	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 orang	8 orang	8 orang	-	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek dan sosialisasi	128,468,000
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	-	-	-	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Belanja komponen instalasi listrik	29,522,000
6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja bendera dan umbul-umbul	2,430,000
7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-	Penyediaan peralatan rumah tangga	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,210,000
8	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	-	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja ATK, makan minum harian pegawai dan makan minum rapat	223,219,650
9	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Belanja cetak dan penggandaan	10,993,500

10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	176,194,000
11	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarpras kantor	29,096,500
12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Penyediaan jasa surat menyurat	Belanja materai	2,200,000
13	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belanja air, listrik, telepon dan internet	153,578,000
14	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium tenaga kontrak, PPID, Pejabat Pengadaan dan Penilai Angka Kredit	2,460,860,000
15	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Belanja BBM dan pelumas serta service dan suku cadang mobil dinas Kepala Satuan dan Sekretaris	74,630,100
16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas atau operasional	Belanja BBM dan pelumas serta service dan suku cadang mobil dinas operasional Satpol PP dan Damkar	197,615,400
17	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Belanja pemeliharaan gedung dan halaman kantor	85,000,000

18	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	18 unit	Pemeliharaan /rehabilitasi sarpras gedung kantor atau bangunan lainnya	Belanja pemeliharaan sarpras kantor	10,170,000				
----	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	--	-------------------------------------	------------

Kepala Seksi Ketertiban Umum

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Sub Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 kasus	90 kasus	91 kasus	92 kasus	92 kasus	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Patroli, pengamanan dan pengawalan	82,600,000

Kepala Seksi Ketenteraman masyarakat

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Sub Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 kasus	90 kasus	91 kasus	92 kasus	92 kasus	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Konsultasi / Koordinasi Tibum Tranmas dan razia gabungan	17,256,000

Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi										
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Sub Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sosialisasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020	69,889,850
Kepala Seksi Data dan Informasi										
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Sub Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Konsultasi / Koordinasi Satgas Linmas	4,803,000
Kepala Seksi Pengawasan										
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Sub Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas kepatuhan / penegakan Perda	21,480,000

Kepala Seksi Penegakan										
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Sub Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Penanganan pelanggaran Perda	67,200,000
2	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 laporan	2 laporan	1 laporan	-	-	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Konsultasi / Koordinasi PPNS	14,381,000

Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Sub Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Konsultasi / Koordinasi	4,645,000
2	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Belanja BBM dan Perjalanan dinas dalam rangka pemadaman dan pengendalian	91,880,000
3	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Perjalanan dinas dalam rangka penyelamatan dan evakuasi	3,360,000

4	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6 unit	-	6 unit	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan sarpras Damkar, perjalanan dinas dan pemeliharaan	4,005,342,000
5	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan / Gedung / Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan / Gedung / Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Perjalanan dinas dalam rangka pendataan sarpras proteksi kebakaran	2,520,000
6	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Perjalanan dinas dalam rangka penilaian sarpras proteksi kebakaran	1,680,000
7	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Perjalanan dinas dalam rangka investigasi kejadian kebakaran	3,360,000

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran										
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Triwulan I	Target Triwulan II	Target Triwulan III	Target Triwulan IV	Sub Kegiatan	Pekerjaan/Aktivitas Yang Dilakukan	Anggaran (Rp)
1	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 desa / kelurahan	-	1 desa / kelurahan	-	-	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran serta hibah	866,235,000

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas,



**SYAHKIPIN, S.Sos**  
 Pembina Tk.I (IV/b)  
 NIP. 19680503 198608 1 001







4,979,022,000















